BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Perkembangan dunia perbankan telah terlihat kompleks, dengan berbagai macam jenis produk dan sistem usaha dalam berbagai keunggulan kompetitif. Kekomplekan ini telah menciptakan suatu sistem dan pesaing baru dalam dunia perbankan, bukan hanya persaingan antar bank tetapi juga antara bank dengan lembaga keuangan. Sektor perbankan telah menunjukkan peranan yang semakin penting didalam menunjang pembangunan ekonomi nasional, baik melalui fungsinya sebagai penghimpunan dana dari masyarakat maupun sebagai lembaga yang dapat menyalurkan dana keberbagai pihak dan kegiatan yang potensial.

Bank Indonesia menilai koordinasi erat antara BI dan pemerintah sangat dibutuhkan untuk mencapai stabilitas makro-ekonomi dan pertumbuhan 6 persen pada tahun 2007. BI memiliki enam dari delapan syarat atau langkah yang dibutuhkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik. Hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) mengenai prospek perekonomian Indonesia tahun 2007 yang dipublikasikan, Selasa (22/11) di Jakarta juga mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi 2007 berpotensi meningkat lebih tinggi mencapai 6,3 persen jika langkah yang dibutuhkan direalisasikan lebih cepat. Jika langkah-langkah yang dibutuhkan gagal diimplementasikan secara tuntas, pertumbuhan ekonomi 2007 diperkirakan hanya 5,7 persen.

Keuangan mikro di Indonesia telah ada sejak akhir abad ke-19 dengan berdirinya Bank Kredit Rakyat dan Lumbung Desa. Kedua lembaga ini dibentuk untuk membantu petani, pegawai, dan buruh melepaskan diri dari lintah darat. Pada 1905 Bank Kredit Rakyat ditingkatkan menjadi Bank Desa yang cakupan pelayanannya diperluas meliputi kegiatan usaha di luar bidang pertanian. Keadaan ini berubah setelah keluarnya Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menetapkan bahwa hanya ada dua jenis bank di Indonesia, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Lembaga keuangan yang tidak memenuhi syarat sebagai BPR kemudian dikenal sebagai lembaga keuangan nonformal atau bank gelap. Lembaga keuangan nonformal tercatat ada 2.272 LDKP dan 5.345 BKD yang tidak memenuhi syarat sebagai BPR. Kegiatan utama BPR adalah menerima simpanan dan memberikan kredit skala kecil dalam jangka pendek kepada pedagang-pedagang di pasar dan penduduk desa. Wilayah kerjanya umumnya bersifat lokal tingkat kotapraja/desa.

Selama ini BPR seolah berada dalam kegelapan pada saat melaksanakan proses untuk memberikan fasilitas kredit (penyediaan dana) kepada calon debitur yang belum dikenal dengan baik, karena sangat sulit untuk mendapatkan informasi tentang calon debitur tersebut terutama debitur yang sebelumnya telah memperoleh penyediaan dana dari bank lain. Debitur yang bermasalah berpindah dari bank lain ke BPR sangat mungkin terjadi. Hal tersebut karena belum di ikutsertakannya BPR dalam Sistem Informasi Debitur (SID) yang dikelola oleh BI. BPR, maka mulai tahun 2006 BPR diikutsertakan dalam SID, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.7/8/PBI/3005 tanggal 24 Januari 2005 tentang

Sistem Informasi Debitur. SID menjadikan BPR bertindak sebagai pelapor dan wajib bagi BPR dengan total asset Rp10,00 miliar keatas, sedangkan BPR dengan total asset dibawah Rp10 miliar tidak wajib, namun diperkenankan untuk menjadi pelapor sepanjang memiliki infrastruktur yang memadai. (*www.bi.go.id*)

PD BPR Subang Cabang Pusakanagara dalam pemberian kredit tetap berdasarkan pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) untuk menghindari risiko kredit macet. Bank juga langsung melakukan penanganan atas permohonan kredit yang di terima dengan melakukan survei ke tempat usaha dan survei jaminan setelah dilakukan wawancara pendahuluan. Pelayanan yang cepat namun tepat sasaran akan memberikan rasa nyaman bagi para calon nasabah kredit. Untuk produk kredit diberikan dengan jangka waktu bervariasi yaitu modal kerja sampai dengan 1 tahun dan investasi sampai dengan 3 tahun. Untuk kredit dengan jangka waktu yang panjang diberikan untuk fasilitas yang berhubungan dengan pemilikan rumah. Penyaluran kredit merupakan faktor yang sangat menjadi perhatian bagi PD BPR Subang Cabang Pusakanagara maka perlu ditumbuh kembangkan dengan memberikan kredit kepada sektor-sektor usaha yang produktif untuk skala Usaha Kecil Menengah (UKM) serta selalu menjaga hubungan yang harmonis antara nasabah dengan Bank dalam rangka menghindari terjadinya kredit macet.

Lembaga perkreditan baik formal maupun non formal keberadaanya saat ini sangat membantu para industri kecil dalam memenuhi kekurangan modal untuk usahanya. Pada umumnya suatu usaha memanfaatkan dana yang tidak kecil jumlahnya dan manfaat dari dari usaha tersebut baru akan diterima pada masa

yang akan datang. Waktu yang akan datang penuh dengan ketidak pastian, sehingga diperlukan suatu penilaian dalam suatu usaha, dimana seorang nasabah apakah mampu dalam mengembalikan suatu pinjaman yang telah dipinjam untuk menjalankan usahanya.

Usaha Kecil Menengah (UKM) pada umumnya sangat membutuhkan pemberian kredit untuk menambah modal usahanya, baik itu kredit program maupun non program. Sebagai contoh yaitu petani, jika petani diberikan kredit berupa uang tunai maka dikhawatirkan petani tidak akan mengutamakan produksi tinggi tetapi hanya mengutamakan laba yang optimal. Hal ini dikarenakan periode kredit dan waktu pengembaliannya. Petani membutuhkan waktu sekitar 5 bulan untuk satu proses produksi dan pengembalian/hasil produksi diperoleh satu kali, petani mengharapkn kredit dengan lama pinjaman sekitar 4-6 bulan (satu musim), waktu pengembalian setelah panen dengan frekwensi pembayaran satu kali (bunga dan pokok). Berbeda denagn nasabh non petani seperti pedagang hasil, kios semprotan, pengolahan hasil, mereka bias akses baik musiman maupun tahunan dengan waktu pengembalian biasanya secara bulanan, per semester, maupun tahunan.

Dengan adanya latar belakang yang telah terpaparkan diatas, maka menarik penulis untuk menilai/mengevaluasi kelayakan pemberian kredit yang disalurkan oleh bank untuk para nasabah yang membutuhkan tambahan modal dalam rangka memajukan usahanya. Pihak yang menyalurkan kredit yaitu bank, haruslah pintar dalam menilai suatu usaha para nasabah dimasa yang akan datang akan menguntungkan/maju ataukah tidak. Faktor ini sangatlah penting bagi pihak

bank karena hal ini akan menunjukkan bahwa layak atau tidaknya suatu usaha diberikan kredit dalam rangka untuk memajukan usahanya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang kriteria kredit dan analisa kredit dengan mengambil judul : **"Prosedur Penilaian Kelayakan Pemberian Kredit Pada PD. BPR Subang Cabang Pusakanagara."**

1.2 Tujuan Kerja Praktek

Adapun tujuanya :

1. Untuk mengetahui kriteria pemberian kredit PD. BPR Subang Cabang Pusakanagara.
2. Untuk mengetahui prosedur penilaian pemberian kredit PD. BPR Subang Cabang Pusakanagara.
   2.1 Prinsip-prinsip analisa pemberian kredit PD. BPR Subang Cabang Pusakanagara.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan penanggulangan dalam penilaian pemberian kredit di PD. BPR Subang Cabang Pusakangara.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

1. Bagi Manajemen PD. BPR Subang Cabang Pusakanagara

   Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana sumbangan pikiran dalam menentukan kebijaksanaan kredit yang diberikan kepada nasabah.

2. Bagi Penulis

   Untuk membandingkan antara teori yang didapat selama perkuliahan dengan keadaan di dunia kerja. Untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keterampilan sesuai dengan bidang perbankan.

3. Bagi Pemilik / Pemegang Saham

   Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas produk yang ditawarkan untuk masa yang akan datang.

4. Bagi Calon Debitur

   Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan wawasan dalam mengambil pinjaman kredit.

5. Bagi peneliti selanjutnya

   Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.4 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

a. Lokasi Kerja Praktek

lokasi yang di jadikan tempat Kerja Praktek oleh penulis adalah PD. BPR Subang Cabang Pusakanagara atau tepatnya di JL. Raya Pusakanagara No.192 Kec. Pusakanagara - Subang.

b. Waktu Kerja Praktek

Waktu Kerja Praktek dilaksanakan pada tanggal 04 Juli 2011 sampai dengan 02 Agustus 2011 yaitu selama satu bulan.

Tabel 1.1 Aktivitas kantor dan Kerja Praktek

No	Keterangan	Bulan																			
		Juni				Juli				Agustus				Septemb				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Survey tempat KP																				
2	Kerja Praktek																				
3	Wawancara																				
4	Penyusunan laporan KP																				
5	Bimbingan KP																				
6	Penyerahan laporan KP																				